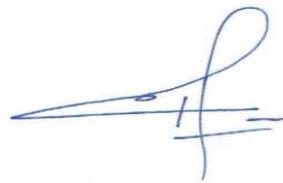


## **KATA PENGANTAR**

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menyelesaikan dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019. Penyusunan Perubahan Renja juga mengacu kepada RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan di dalam visi Terwujudnya efektivitas komunikasi dan informatika dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mendukung Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Agamis dan Produktif.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Kandangan,      Oktober 2019  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Drs. Hendro Martono, MT  
Pembina Tk. I  
19730309 199402 1 002

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 LATABELAKANG .....	4
1.2 LANDASAN HUKUM .....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN LALU</b>	
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISKOMINFO .....	8
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISKOMINFO .....	12
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISKOMINFO .....	14
2.4 REVIEW TERHADP RANCANGAN AWAL RKPD .....	15
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....	15
<b>BAB III TUJUAN, SASARAM, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	16
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISKOMINFO .....	17
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	18
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	19

## LAMPIRAN

- **RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019**

## DAFTAR TABEL

	Hal
<b>TABEL 2.1</b>	
<b>CAPAIAN KINERJA DISKOMINFO KAB. HSS</b>	
<b>TAHUN 2019 TRIWULAN I.....</b>	<b>8</b>
<b>Tabel 2.2</b>	
<b>ISU STRATEGIS DISKOMINFO BERDASARKAN</b>	
<b>TUPOKSI .....</b>	<b>12</b>
<b>TABEL 3.1</b>	
<b>PENJABARAN VISI, MISI DAN TUJUAN</b>	
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN</b>	
<b>HULU SUNGAI SELATAN .....</b>	<b>15</b>
<b>TABEL 3.2</b>	
<b>URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI</b>	
<b>DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI</b>	
<b>SELATAN TAHUN 2019 .....</b>	<b>18</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja yang mengacu pada pasal ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaanya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Melalui Tahapan yang sudah ditetapkan. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun dengan rinci dan operasional Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 sebagai jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentunya mengacu pada tahapan yang telah ditetapkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun kembali Rencana Kerja (Renja) Perubahan sebagai acuan pembangun selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berkembang serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu *“Menuju Kabupaten yang cerdas, inovatif, teknologis dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia akhirat”*

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja ( Renja – SKPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) . Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

## 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.  
Pasal 137 ayat (1) menyatakan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11)
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 adalah sebagai acuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten HSS sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten HSS.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- C. Program dan Kegiatan

## **BAB IV. PENUTUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISKOMINFO sampai dengan Triwulan II tahun 2019 dan Capaian Renstra DISKOMINFO**

Di tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS akan melaksanakan 7 program dengan 25 Kegiatan, terdapat penambahan kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan Pelayanan Sandi pada program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

Berikut merupakan penjabaran evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfo sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, yang tertuang dalam table di bawah ini :

**Tabel 2.1**

#### **Capaian Kinerja DISKOMINFO Kab. HSS Triwulan II tahun 2019**

**PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT TRIWULAN II**

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
				TW 1	TW2	TW3	TW4	TW 1	TW2	TW3	TW4	TW 1	TW2	TW3	TW4
	<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi</b>			22,40	22,80	23,10	23,50	22,40	22,88	0	0	100%	0	0	0
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks</b>	<b>23,50</b>												
	<b>Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan</b>			81,89 (A)			81,89 (A)								
	<b>Nilai / Predikat AKIP</b>	<b>Nilai/ Predikat</b>													
<b>1</b>	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan Daerah	Persen	100%	65,22	78,26	86,96	100	65,22	78,26		100%	100%		
<b>1.1</b>	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	10	11	13	15	10	11		100%	100%		
<b>1.2</b>	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	8	10	11	12	8	10		100%	100%		

## PENCAPAIAN KINERJA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TRIWULAN II

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
				TW 1	TW2	TW3	TW4	TW 1	TW2	TW3	TW4	TW 1	TW2	TW3	TW4
<b>Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana penunjang perekonomian yang berkualitas</b>	<b>Persentase Jangkauan teknologi informasi dan komunikasi</b>	%	100%	20%	53%	80%	100%	7%	133%			7%	133%		
Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah SKPD/Desa yang terkoneksi dengan intranet ke Server Center Diskominfo	SKPD	15 SKPD	3	8	13	15	1	20			7%	133%		
	Jumlah Aplikasi e-Government yang berfungsi dengan baik	Aplikasi	5 Aplikasi	2	4	5		6	13			120%	260%		
Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Teknologi dan Informatika	SKPD yang terkoneksi jaringan internet dan atau intranet ke Server Center Diskominfo	SKPD	15 SKPD	3	8	13	15	1	20			7%	133%		
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi															
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Akses Internet															
<b>Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan IT dengan baik</b>	%	100%	40%	80%	100%		120%	260%			120%	260%		
Kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah aplikasi e-Government yang terintegrasi di server center Diskominfo	Aplikasi	5 Aplikasi	2	4	5		6	13			120%	260%		
<b>Membangun Citra Positif Pemkab Kabupaten HSS</b>	<b>Rasio berita positif dan negatif di media massa tentang Kabupaten HSS</b>	Berita	500	150	300	450	500	202	213			40%	43%		
Program Pelayanan Informasi dan Media Massa	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	PD	38	38				38							

		Persentase kegiatan pemerintah kabupaten HSS yang terpublikasi	%	100%	30%	60%	90%	100%	40%	43%			40%	43%		
	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah	Perangkat Daerah yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	PD	38	38				38							
	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Produksi Informasi Yang Terpublikasi	Informasi	500	150	300	450	500	202	213			40%	43%		
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana LPPL Kandungan TV															
	Kegiatan Paket Acara LPPL Kandungan TV															

### PENCAPAIAN KINERJA URUSAN PERSANDIAN DAN STATISTIK TRIWULAN II

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)					
				TW 1	TW2	TW3	TW4	TW 1	TW2	TW3	TW4	TW 1	TW2	TW3	TW4		
	<b>Meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan statistik dan persandian</b>	Dokumen	3 Dokumen				3 Dokumen										
	%Pengamanan informasi daerah	%	100%				100%										

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai pada Triwulan II tahun 2019 telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

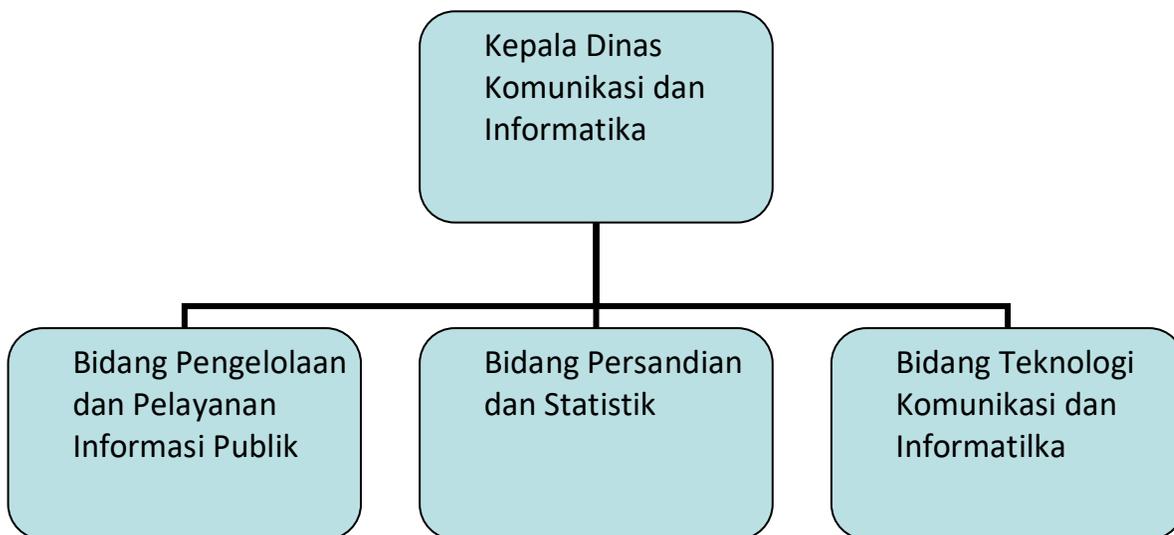
Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan wajib bukan urusan dasar bidang pemerintahan Komunikasi dan Informatika, harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan azas-azas pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan aturan umum penyelenggaraan Negara.

Tugas, fungsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai 3 bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sseperti tergambar pada gambar 2.1 di bawah ini

Gambar 2.1

Pembagian Bidang Diskominfo Kab. HSS



Di tahun 2019 mulai dibangun sarana dan prasarana Data Center oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. HSS. Sementara itu aplikasi pemerintah yang terintegrasi pada triwulan II tahun 2019 ini hampir mencapai target. Dari 45 aplikasi pemerintah yang terintegrasi, sebanyak 43 yang telah dibuat. Namun demikian belum semuanya dapat diterapkan.

Pemenuhan informasi pada Server Center Diskominfo juga belum dapat dilaksanakan, mengingat pembangunan Data Center masih berlangsung.

Fasilitas umum berupa gazebo dan wifi gratis telah tercapai 22 unit yang sudah terbangun sampai dengan triwulan II pada tahun 2019 ini.

Pada indikator persentase layanan pengaduan masyarakat secara elektronik yang ditanggapi tepat waktu pada triwulan II tahun 2019 ini telah tercapai 32,52% yaitu sebanyak 281 berupa sms yang dikirimkan oleh masyarakat dan ditanggapi oleh pemerintah daerah melalui siaran langsung pada stasiun radio local. Selanjutnya, pada indikator persentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Public (KIP) yang dikoordinasikan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada triwulan II tahun 2019 ini telah berhasil mencapai target dari 46 SKPD yang ditargetkan. Sementara itu pada indikator persentase kegiatan pemerintah kabupaten HSS yang terpublikasi telah mencapai target sebesar 63,33%, yaitu sebanyak 341 kegiatan yang dapat dipublikasi dari 538 yang ditargetkan.

Pada indikator persentase informasi dari pemerintah yang terproteksi dari penyalahgunaan pemberitaan masih tercapai sebesar 11,90%, yaitu sebanyak 64 informasi yang bersumber dari telegram senopati yang diterima. Sumber informasi lain masih belum bisa dilakukan pengamanan oleh Diskominfo Kab. HSS mengingat peralatan yang belum maksimal tersedia serta belum adanya sandiman.

Selanjutnya pada indikator persentase dokumen aktif statistic sektoral yang tersedia baru bisa dilaksanakan pada triwulan III mendatang dikarenakan ada perubahan beberapa item belanja langsung dan menunggu pengesahan Perubahan Anggaran 2019.

## 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tupoksinya dapat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Isu Strategis Diskominfo Berdasarkan Tupoksi**

<b>Tugas Pokok</b>	<b>Fungsi</b>	<b>Isu Strategis</b>
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.	Penyusunan kebijakan teknis urusan	Belum terintegrasiya database dan layana E-Government
	Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, persandian dan statistic	Belum Efisiensinya Infrastruktur telekomunikasi
		Keterbatasan akses masyarakat terhadap Informasi

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbeda dengan rancangan awal. Pada Rencana Kerja Perubahan tahun 2019 ini terdapat pengurangan sebesar 1% dari total anggaran belanja langsung. Pengurangan tersebut sesuai dengan surat edaran Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor SE-910/656/BAKEUDA perihal Pedoman Penyusunan RKAP-SKPD Tahun Anggaran 2019. Selain terdapat beberapa perubahan belanja langsung pada kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi.

#### **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan di awal tahun 2019 dimana usulan masyarakat dapat ditampung melalui Musrenbang Kecamatan, dan saat ini belum ada usulan terkait program dan kegiatan yang menyangkut tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM 2 KEGIATAN**

##### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu *Techno Economy*, teknologi menjadi factor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjasinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya menjadi perekonomian yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Akibat dari kondisi tersebut, salah satu kekuatan bangsa dapat pula diukur dari kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai factor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energy untuk peningkatan daya saing. Pembangunan iptek merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu, iptek menentka tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumberdaya baru yang lebih bernilai.

Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan Bangsa dan Negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah harus berjalan beriringan dalam mengembangkan potensi daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya animo masyarakat yang berusaha berinteraksi dengan pemerintah daerah khususnya tentang pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kondisi tersebut memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan situasi yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HSS**

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu terkait penyusunan kebijakan teknis urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Sekretariat, Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Bidang Persandian dan Statistik, dan Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika.

Isu strategis yang diangkat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

2.5.1 Belum terintegrasinya Database dan layanan e-Governance

2.5.2 Belum Efisiennya Infrstruktur Telekomunikasi

2.5.3 Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi

Berdasarkan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berikut penjabaran misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selata

Tabel 3.1  
**Penjabaran visi, misi dan tujuan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

MISI	TUJUAN	SASARAN
Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-Government	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-Government	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-Government
Meningkatkan kualitas infrasrtuktur jaringan	Meningkatkan kualitas infrasrtuktur jaringan	Meningkatnya kualitas infrasrtuktur jaringan
Mewujudkan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Membangun citra positif Kabupaten HSS	Membangun citra positif Kabupaten HSS	Membangun citra positif Kabupaten HSS
Melaksanakan pengamanan informasi pemerintah daerah dan layanan dokumen aktif statistic	Melaksanakan pengamanan informasi pemerintah daerah dan layanan dokumen aktif statistic	Terlaksananya pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan Layanan Dokumen Aktif Statistik Sektoral
Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

### 3.3 Program dan Kegiatan

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Sementara kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,

dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 merupakan pelaksanaan operasional tahun pertama dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2014 - 2019 dan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019. Hal tersebut tertuang dalam table berikut :

**Tabel 3.2**

**Uraian Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Perubahan Anggaran**



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKAP  
SKPD  
2.2**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
Tahun Anggaran 2019

**Urusan** 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar  
**Bidang** 2.10 Komunikasi dan Informatika  
**Unit Organisasi** 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika  
**Sub Unit** 2.10.01.1 Dinas Komunikasi dan Informatika

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PRO	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		82 Indeks		2.449.135.400,00	2.540.735.400,00	91.600.000,00	3,74
	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	1 Tahun	3	87.013.400,00	87.013.400,00	0,00	0,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten,SK	1 Tahun	3	897.320.000,00	993.120.000,00	95.800.000,00	10,68
	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi	Kabupaten	1 Tahun	3	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	1 Tahun	3	23.352.000,00	23.352.000,00	0,00	0,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	SKPD	1 Tahun	1	1.084.950.000,00	1.080.750.000,00	(4.200.000,00)	(0,39)
	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Kabupaten	1 Tahun	3	342.500.000,00	342.500.000,00	0,00	0,00
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		82 Indeks		698.497.300,00	787.637.300,00	89.140.000,00	12,76
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	1 Tahun	1	499.097.300,00	587.337.300,00	88.240.000,00	17,68
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	1 Tahun	3	46.100.000,00	47.000.000,00	900.000,00	1,95
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	1 Tahun	3	51.900.000,00	51.900.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	1 Tahun	3	101.400.000,00	101.400.000,00	0,00	0,00
	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		100 Persen		9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00
	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	12 Dokumen	3	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00	0,00
	Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	15 Dokumen	3	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00	0,00
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Media Massa</b>		100 Persen	20	3.420.735.000,00	3.425.235.000,00	4.500.000,00	0,13
	Peningkatan Sarana dan Prasarana LPLP Kandungan TV	SKPD	526	1	458.650.000,00	463.150.000,00	4.500.000,00	0,98
	Paket Acara LPLP Kandungan TV	SKPD	526	1	269.100.000,00	269.100.000,00	0,00	0,00
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	SKPD	526	1	2.679.030.000,00	2.679.030.000,00	0,00	0,00
	Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah	SKPD	38 SKPD	3	13.955.000,00	13.955.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KOD E PRO C /	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumb er Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah</b>		3 Jenis		99.845.000,00	88.055.000,00	(11.790.000,00)	(11,81)
	PENINGKATAN PELAYANAN SANDI	Kabupaten	240 Telegram	3	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00
	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH	Kabupaten	3 Buku	1	92.105.000,00	80.315.000,00	(11.790.000,00)	(12,80)
	<b>Program Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>		14 SKPD		970.040.000,00	1.320.040.000,00	350.000.000,00	36,08
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Kabupaten	5 Aplikasi	1	836.780.000,00	1.186.780.000,00	350.000.000,00	41,83
	Sosialisasi Kegiatan Teknologi dan Informatika	Kabupaten	15 SKPD	1	41.905.000,00	49.250.000,00	7.345.000,00	17,53
	Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Kabupaten	15 SKPD	1	41.355.000,00	34.010.000,00	(7.345.000,00)	(17,76)
	Peningkatan Pelayanan Akses Internet	Kabupaten	15	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>				7.647.802.700,00	8.171.252.700,00	523.450.000,00	6,84

KANDANGAN, 08 July 2019  
**Kepala Dinas**

**Drs. HENDRO MARTONO, MT**

NIP. 19730309 199402 1 002

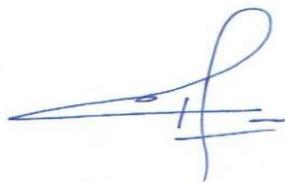
#### **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 disusun sebagai pelaksanaan tahun kedua bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena SKPD tersebut baru berdiri pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat memberi umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas oleh para pemimpin manajemen dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat dengan pembangunan IPTEK melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (*stakeholder*) dalam mewujudkan *Good Governance*.

Kandangan, Oktober 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Drs. Hendro Martono, MT

Pembina Tk. I

19730309 199402 1 002

